

KONFLIK CHINA-TAIWAN DAN IMPLIKASINYA

7

Simela Victor Muhamad

Abstrak

Konflik China-Taiwan menjadi isu yang dikhawatirkan masyarakat internasional menyusul kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, ke Taiwan pada awal Agustus 2022. Konflik China-Taiwan bisa terjadi secara terbuka ketika China menggunakan kekuatan militer untuk merebut kembali wilayah pulau itu. Melalui kajian singkat ini, implikasi dari terjadinya konflik terbuka antara China dan Taiwan, khususnya terhadap Indonesia dan kawasan, dianalisis dan menjadi fokus bahasan. Konflik China-Taiwan yang dilatarbelakangi oleh sejarah konflik internal politik China masih mewarnai hubungan China dan Taiwan. Yang menjadi kekhawatiran masyarakat internasional saat ini adalah hadirnya kekuatan militer China yang sudah sangat siap untuk menguasai kembali Taiwan menjadi bagian teritorialnya. Kekhawatiran bertambah ketika kehadiran militer AS di kawasan ini, sebagai bentuk dukungan kepada Taiwan, mendapat respons penentangan dari China. Meskipun isu Taiwan bagi China merupakan masalah internal, negara-negara kawasan, termasuk Indonesia harus mendesak semua pihak, terutama China dan AS, untuk bisa menahan diri dan menjaga perdamaian di kawasan ini.

Pendahuluan

Konflik China-Taiwan menjadi salah satu isu yang paling dikhawatirkan masyarakat internasional, khususnya negara-negara Asia Timur, menyusul kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, ke Taiwan pada 2-3 Agustus 2022. Kekhawatiran tersebut menjadi isu yang diberitakan media hingga pertengahan Agustus 2022 (Kompas, 15 Agustus 2022). Konflik China-Taiwan bisa saja terjadi secara terbuka ketika China, yang

mengklaim Taiwan sebagai bagian teritorialnya, menggunakan kekuatan militer untuk merebut kembali wilayah pulau itu yang sejak 1949 memerintah secara mandiri saat pemimpin komunis, Mao Zedong, mengalahkan pemimpin Kuomintang (KMT), Chiang Kai-Shek, yang menyingkir dan mendirikan Pemerintah Taiwan. Penyatuan Taiwan ke pangkuan China sudah lama menjadi impian Presiden Xi Jinping.

Konflik China-Taiwan telah menimbulkan kekhawatiran kawasan,



bahkan internasional, mengingat keberadaan Taiwan yang sangat penting sebagai penyuplai utama semikonduktor (*chip*) dunia, yang sangat dibutuhkan oleh industri elektronika dan otomotif (suaramerdeka.com., 28 April 2022). Ini artinya, implikasi dari terjadinya konflik antara China dan Taiwan menarik untuk dianalisis, khususnya terhadap Indonesia dan kawasan yang secara geopolitik sangat berkepentingan dengan situasi yang terjadi di Taiwan. Implikasi dari konflik China dan Taiwan tersebut dianalisis melalui tulisan singkat ini, dengan terlebih dahulu dibahas secara sekilas aspek historis dari konflik China dan Taiwan.

Sekilas Konflik China-Taiwan

Konflik China dan Taiwan kembali memanas usai China melangsungkan latihan militer di Selat Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, ke Taiwan. Jauh sebelum ini, hubungan China dan Taiwan beberapa kali sempat memanas. Konflik keduanya tidak lepas dari China yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan negaranya. Di sisi lain, Taiwan tidak mengakui klaim China tersebut. Terjadinya konflik China dan Taiwan tersebut sudah tentu tidak terlepas dari situasi masa lalu, saat China mengalami kekacauan politik pasca-Dinasti Qing yang memimpin China saat itu jatuh pada 1911 (Maizland: 2022). Saat itu, dua kelompok politik-militer dengan ideologi berlawanan, saling bersaing untuk masa depan China. Keduanya adalah Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) dan Partai Komunis China (PKC).

KMT membayangkan China sebagai republik konstitusional mengikuti model pemerintahan negara barat, sedangkan PKC yang dibentuk pada 1921, mengupayakan revolusi komunis. Akan tetapi, keduanya

memutuskan bekerja sama untuk melawan penjajahan Jepang selama periode 1930-an. Pada 1 Desember 1943, melihat Jepang yang mulai mengalami kekalahan pada masa Perang Dunia II, kepala negara China, AS, dan Inggris Raya menandatangani “Deklarasi Kairo”, yang menyebutkan bahwa semua wilayah yang telah direbut Jepang dari China seperti Manchuria, Taiwan, dan Kepulauan Penghu akan dikembalikan ke China (Thim: 2017). Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 1945, Taiwan pun kembali ke pangkuan China. Namun, kedua partai kembali melakukan perang sipil. Peperangan terus terjadi sampai pemimpin PKC, Mao Zedong, mengumumkan pembentukan Republik Rakyat China (RRC) di Beijing pada 1 Oktober 1949.

Pembentukan RRC, sebagai bentuk kemenangan PKC, membuat pemimpin KMT, Chiang Kai-Shek, mundur ke Taiwan. KMT di bawah pimpinan Chiang Kai-Shek kemudian mendeklarasikan Taipei di Pulau Taiwan sebagai ibu kota Republik China (*Republic of China/ROC*) pada Desember 1949, sekaligus memutuskan kontak dengan China daratan yang dikuasai oleh PKC. Pada 1950, Taiwan menjadi sekutu AS yang berperang melawan Komunis China di Korea (reuters.com., 2 Agustus 2022). AS pun mengerahkan armada di Selat Taiwan untuk melindungi sekutunya dari kemungkinan serangan China daratan. Dalam perkembangannya kemudian, dan atas kalkulasi politik AS yang melihat China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, AS pun menjalin hubungan diplomatik dengan China tetapi tetap berkomitmen untuk membantu pertahanan Taiwan. AS juga mendukung “*One China Policy*”, yang

mana tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka dan berdaulat, tetapi AS tetap menjalin hubungan perdagangan dan militer dengan Taiwan.

Dalam perkembangannya, hubungan China-Taiwan mengalami pasang surut, dan biasanya akan mengalami ketegangan ketika Partai Progresif Demokratik yang secara tradisional pro-kemerdekaan memenangkan pemilu di Taiwan. Hubungan China dan Taiwan kembali memanas usai kedatangan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, ke Taiwan (The Jakarta Post, 11 Agustus 2022). Sehari setelah kunjungan Pelosi, China mengerahkan sejumlah pesawat dan menembakkan rudal langsung ke dekat Taiwan dalam latihan militer. Di sisi lain Taiwan, sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan, mengerahkan jet untuk memperingatkan 22 pesawat tempur China yang melintas garis tengah Selat Taiwan ke zona pertahanan udaranya (wsj.com., 9 Agustus 2022). Menjadi kekhawatiran masyarakat internasional saat ini adalah, konflik yang terjadi antara China dan Taiwan dibayangi oleh kekuatan militer China yang lebih siap untuk menyerang Taiwan, atau setidaknya melakukan aksi blokade total yang bisa membuat pelabuhan dan bandara utama Taiwan terisolasi.

Implikasi bagi Indonesia dan Kawasan

Konflik China dan Taiwan bisa menimbulkan implikasi yang lebih buruk dibandingkan dengan perang Ukraina-Rusia. Pasalnya, konflik China dan Taiwan akan melibatkan AS. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai bahwa konflik antara China dan Taiwan

yang melibatkan AS merupakan risiko eksogen, tetapi tetap perlu diwaspadai. Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu, mengemukakan bahwa Indonesia tidak akan terkena dampak secara langsung. Namun, Febrio menyebut bahwa terdapat risiko rambatan dari konflik tersebut terhadap perekonomian Indonesia (bisnis.com., 8 Agustus 2022).

Potensi dampak rambatan dari konflik itu bisa muncul terhadap mobilitas perdagangan dan investasi. Seperti diketahui, China dan AS merupakan mitra dagang Indonesia, sehingga gangguan dari masing-masing pihak maupun keduanya bisa berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia. Kondisi serupa terjadi dalam hal investasi. Pasalnya, China dan AS masuk dalam 10 besar negara yang menanamkan modalnya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Apabila kedua negara itu terlibat konflik, aliran investasi bisa terhambat. Berkaca dari konflik antara Rusia dan Ukraina yang tidak melibatkan Indonesia tetapi dampak rambatannya sangat terasa, bahkan secara global. Oleh karena itu, eskalasi konflik di Taiwan tetap harus diwaspadai.

Sementara itu, Menlu Retno LP Marsudi menyebutkan bahwa potensi konflik antara China dan Taiwan menjadi tantangan tambahan bagi Indonesia dan kawasan. Indonesia sangat berkepentingan pada stabilitas di Taiwan dan sekitarnya. Oleh karena itu, Menlu Retno bersama menlu ASEAN lainnya sangat mencemaskan terjadinya eskalasi ketegangan di Selat Taiwan, dan untuk itu meminta semua pihak sekuat mungkin untuk menahan diri, menjauhi provokasi, serta menghormati piagam PBB dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama

ASEAN. Kecemasan Indonesia sangat beralasan, karena dari 410.000 warga Indonesia di Asia Timur, sebanyak 300.000 orang tinggal di Taiwan. Jika terjadi perang, evakuasi mereka akan sangat rumit. Sebagai gambaran, untuk mengevakuasi tidak sampai 200 WNI dari Ukraina saja, butuh operasi lintas negara selama hampir sebulan (Kompas, 15 Agustus 2022).

Indonesia juga terikat kuat dengan Asia Timur. Dari USD\$228 miliar ekspor Indonesia sepanjang 2021, tercatat USD\$83 miliar berasal dari ekspor ke Taiwan dan sekitarnya. Nilai ekspor Indonesia ke Taiwan setara dengan 7% produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2021. Menurut Bank Dunia, PDB Indonesia tahun 2021 mencapai USD\$1,18 triliun. Nilai ekspor Indonesia ke Taiwan dan sekitarnya lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Indonesia yang selalu di bawah 6% dalam beberapa tahun terakhir (Kompas, 15 Agustus 2022). Data-data ini setidaknya menunjukkan arti penting Taiwan bagi Indonesia, dan Indonesia sudah tentu berharap krisis Taiwan tidak berlanjut ke arah konflik terbuka.

Selain itu, ada dua faktor lain yang semakin membesarkan makna posisi Taiwan bagi Indonesia, dan tentu juga bagi kawasan, yaitu rantai pasok global dan rute pelayaran untuk angkutan ekspor Indonesia. Rantai pasok global membuat sebagian komoditas ekspor Indonesia dikirim ke negara lain untuk diolah. Selanjutnya, hasil olahan itu dikirim oleh Taiwan dan negara sekitarnya. Adapun untuk mengejar keekonomian biaya, sebagian ekspor Indonesia ke Asia Timur dan kawasan lain menggunakan pelabuhan perantara. Selain di Asia Tenggara, pelabuhan perantara ekspor Indonesia itu

berlokasi di China dan Korea Selatan. Ekspor secara langsung dan tidak langsung akan sulit dikirimkan jika terjadi perang atau sekadar ketegangan di sekitar Taiwan, karena kapal pengangkutnya tidak ada (cnnindonesia.com., 5 Agustus 2022).

Hal itu sudah terbukti ketika China menggelar latihan perang pada minggu pertama dan kedua Agustus 2022 sebagai respons atas lawatan Pelosi ke Taiwan. Rute ratusan pesawat dan kapal niaga terpaksa dialihkan. Sebagian pesawat dan kapal batal masuk atau keluar Taiwan. Pengalihan itu sesuai imbauan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) atau Angkatan Bersenjata China. Sebelum latihan dimulai, PLA mengimbau seluruh pesawat dan kapal yang tidak dioperasikan PLA menjauhi lokasi latihan. Jika tetap lewat, awak kapal dan pesawat dianggap tahu risiko dari latihan yang menggunakan roket dan rudal asli itu. Sebaliknya pihak Taiwan menilai, latihan militer China itu sama saja dengan blokade laut dan udara dan telah melanggar perairan teritorial Taiwan dan zona sekitarnya.

Sebagaimana diketahui, Selat Taiwan, yang memisahkan Pulau Taiwan dan benua Asia, adalah rute perdagangan utama untuk kapal yang membawa barang dari dan ke negara ekonomi utama di Asia Timur, seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan juga negara-negara di dunia. Kapal-kapal militer juga tidak terkecuali melalui kawasan ini. Oleh karena itu, penutupan rute di Selat Taiwan oleh China tidak hanya berdampak pada pola perdagangan, perjalanan, dan ekonomi di masa depan, tetapi juga akan berimbas pada pertahanan dan keamanan. AS, sebagai negara besar dan berpengaruh di kawasan, dengan alasan kebebasan navigasi di

perairan internasional, armada kapal-kapal perangnya kerap melintasi Selat Taiwan. Jika kemudian terjadi ketegangan antara China dan AS di Selat Taiwan, maka bisa dipastikan, konflik China dan Taiwan, yang juga akan melibatkan AS, akan berimbas pada keamanan kawasan.

Penutup

Konflik China-Taiwan yang dilatarbelakangi oleh sejarah konflik internal politik China, yang direpresentasikan oleh adanya persaingan antara PKC dan KMT, atau sekarang Partai Progresif Demokratik yang secara tradisional pro-kemerdekaan, masih mewarnai hubungan China dan Taiwan. Yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat internasional dan kawasan saat ini adalah, hadirnya kekuatan militer China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping yang sudah sangat siap untuk menguasai dan “mengambil” kembali Taiwan menjadi bagian dari teritorialnya. Kekhawatiran semakin bertambah ketika kehadiran militer AS di kawasan ini, sebagai bentuk dukungan kepada Taiwan, mendapat respons penentangan dari China sehingga mengakibatkan terjadinya ketegangan.

Eskalasi ketegangan yang meningkat, apalagi sampai terjadi konflik terbuka, akan membawa dampak negatif bagi kawasan, termasuk Indonesia yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap Taiwan. Meskipun isu Taiwan bagi China merupakan masalah internal, negara-negara kawasan, termasuk Indonesia bersama ASEAN, dan juga melalui diplomasi parlemen, harus mengingatkan dan mendesak semua pihak, terutama China dan AS, untuk bisa menahan diri dan menjauhi

provokasi, serta menghormati piagam PBB dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN, yang sangat menjunjung tinggi pentingnya menjaga keamanan dan perdamaian di tingkat regional dan global.

Referensi

- “China-Taiwan Tension”, *The Jakarta Post*, 11 Agustus 2022, hal. 4.
- “Konflik China-Taiwan, Perdagangan dan Perjalanan Terganggu”, *cnnindonesia.com.*, 5 Agustus 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/konflik-china-taiwan-perdagangan-dan-perjalanan-terganggu>, diakses 15 Agustus 2022.
- Maizland, Lindsay. 2022. “Why China-Taiwan Relations Are So Tense”, *cfr.org.*, 3 Agustus 2022, <https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations-tension-us-policy-biden>, diakses 15 Agustus 2022.
- “Membendung Bara dari Utara, Pertaruhan bagi Indonesia”, *Kompas*, 15 Agustus 2022, hal. 4.
- “Milestones in relations between the U.S., China and Taiwan”, *reuters.com.*, 2 Agustus 2022, <https://www.reuters.com/world/milestones-relations-between-us-china-taiwan/>, diakses 15 Agustus 2022.
- “Taiwan Masih Dominasi Industri Semikonduktor Dunia”, *suaramerdeka.com.*, 28 April 2022, <https://suaramerdeka.com/tech/taiwan-masih-dominasi-industri-semikonduktor-dunia>, diakses 15 Agustus 2022.
- “Taiwan Will Always Defends Its Sovereignty”, *wsj.com.*, 9 Agustus 2022, <https://www.wsj.com/articles/taiwan-china-pelosi-ambassador-blockade->, diakses 15

Agustus 2022.
 “Terungkap! Ini Dampak Konflik China vs Taiwan ke Indonesia”, *bisnis.com.*, 8 Agustus 2022, <https://www.bisnis.com/Terungkap!+Ini+Dampak+Konflik+China+vs+Taiwan+ke+Indonesia/>, diakses 15 Agustus 2022.

Thim, Michal and Michael Turton. 2017. “The Chinese Cult of Cairo and the Status of Taiwan”, *thediplomat.com.*, 17 Juli 2017, <https://thediplomat.com/the-chinese-cult-of-cairo-and-the-status-of-taiwan/>, diakses 15 Agustus 2022.



Simela Victor Muhamad
 simela.muhamad@dpr.go.id

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai Analis Legislatif pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya” (bagian dari buku Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); “Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen.” (artikel di Jurnal Politica Vol 7 No. 1, Mei 2016); “Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel” (artikel di Jurnal Politica, Vol. 8 No. 1, Mei 2017); “Indonesia dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme di Kawasan” (bagian dari buku Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2018); dan “Proxy War dalam Konflik di Lebanon” (bagian dari buku Proxy War di Timur Tengah, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.